

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektifitas

Secara etimologi efektifitas berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau dilakukan dengan baik. Sedangkan secara terminologi efektifitas telah banyak didefinisikan oleh para ahli diantaranya :

1. Menurut pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”
2. Georgopolous dan Tannemaum : “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.”
3. Agung Kurniawan dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mendefinisikan efektivitas menyatakan “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”⁷

⁷ Agung Kurniawan, *transformasi pelayanan publik*, (Jogjakarta: Pembaruan, 2005), hlm. 109

4. Efektifitas dijabarkan berdasarkan kapasitas suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber dayanya yang langka dan berharga secara sepandai mungkin dalam usahanya mengejar tujuan operasi dan operasionalnya.⁸

Dari beberapa defenisi diatas bisa disimpulkan bahwa efektifitas berorientasi pada proses dan tercapainya tujuan program. Suatu tujuan tidak akan bisa terlepas dari sebuah proses, karena proses merupakan jalan yang harus dilalui untuk sampai ke suatu tempat. Oleh karena itu tercapainya suatu tujuan sangat tergantung dengan proses yang dilakukan.

Untuk mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas memiliki berbagai sudut pandang. Hal ini tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Misal, untuk sebuah perusahaan efektifitas bisa berarti merupakan laba yang diperoleh sedangkan menurut pengamat sosial berarti kesejahteraan pekerjanya.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

⁸ M Richard Steers , Terj: Magdalena Jamin. *Efektivitas Organisasi*. (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 5

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis yakni:⁹

1. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Sedangkan menurut Richard M. Steers dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:¹⁰

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti

⁹ Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini, *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*, (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987), Hlm 55

¹⁰ M Richard Steers, Terj: Magdalena Jamin. *Efektivitas Organisasi*. (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 9

pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

B. Manajemen

Menurut James A.F. Stoner yang dikutip oleh Hani Handoko manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹¹

Dalam manajemen dikenal istilah POACE adalah kepanjangan dari prinsip manajemen yaitu :

1. Planning

¹¹ T. Hani, Handoko, *Manajemen Edisi 2* (Yogyakarta: BPEF, 1995), hlm 8

Langkah awal yang tidak boleh ditinggalkan sebelum mengadakan kegiatan adalah perencanaan (Planning). Ada ungkapan “Sebuah kebaikan yang tidak terencana akan kalah dengan keburukan yang terencana dengan baik”. Perencanaan diawali dengan munculnya ide atau alasan untuk mengadakan sebuah kegiatan. Langkah berikutnya adalah mulai membuat konsep acara atau draft rencana kegiatan tersebut.

Perencanaan yang baik tidak dilakukan oleh banyak orang, tetapi hanya dilakukan oleh mereka yang dalam posisi sebagai konseptor. Semakin banyak kepala yang berpikir, belum tentu menjadi nilai lebih. Tetapi terkadang malah memperlama proses pengonsepan kegiatan karena semakin banyak pihak yang terlibat, akan semakin sulit menyatukan pandangan. Hendaknya yang menjadi konseptor adalah orang yang benar-benar memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap kegiatan yang akan diadakan.

Dalam tahap ini dihasilkan konsep kegiatan, personel yang dibutuhkan dan *time schedule*. Sehingga dalam tahap berikutnya, tinggal membagi tugas kepanitiaan dan melakukan persiapan sesuai tugas masing-masing.

2. *Organizing*

Setelah tahap perencanaan selesai, hasilnya dibawa ke kelompok yang lebih besar. Yakni mulai dengan langkah membentuk kepanitiaan. Besar kecilnya orang yang terlibat dalam kepanitiaan tentu saja

disesuaikan dengan kebutuhan. Disamping kekurangan SDM bisa menjadi masalah, kelebihan yang terlalu banyak juga bisa menimbulkan masalah. Karena mengatur banyak orang lebih sulit dari pada sedikit orang. Masalah juga bisa timbul dari sisi biaya, yang seharusnya bisa lebih hemat jika yang terlibat tidak terlalu banyak.

3. *Actuating*

Actuating adalah tahap pelaksanaan kegiatan. Jika pada dua tahap sebelumnya dilakukan dengan baik, maka pada tahap ini akan lebih mudah. Sekalipun terkadang juga ada hambatan yang tidak diduga sebelumnya. Untuk menghadapi hal seperti itu, perlu dilakukan langkah berikutnya.

4. *Controlling*

Tugas utama pada tahap ini adalah pengendalian jalannya kegiatan. Pengendalian adalah suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan dalam arti seorang manajer harus yakin bahwa tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi benar-benar menggerakkan organisasi kearah tujuan yang telah dirumuskan. Ini adalah fungsi pengendalian manajemen, dan melibatkan berbagai elemen menetapkan standar prestasi kerja, mengukur prestasi saat ini, membandingkan prestasi ini dengan standar yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan korektif bila ada deviasi yang dideteksi.

5. *Evaluating*

Jika seuruh kegiatan telah selesai, langkah inilah yang dilakukan. Maksudnya untuk mengumpulkan dan meng-“arsip” setiap permasalahan atau kekurangan yang terjadi. Evaluasi minimal dilakukan sekali di akhir kegiatan. Namun, perlu juga dilakukan evaluasi dipertengahan pelaksanaan kegiatan, tanpa mengganggu jalannya kegiatan. Evaluasi juga merupakan salah satu sarana “controlling” ketika kegiatan berlangsung.

C. Pemberdayaan

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan control. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak berubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian diatas. kekuasaan vacuum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia.¹²

Pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan kelompok orang, khususnya kelompok lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam : a. memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; b. menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan

¹² Edi Suharto, *membangun masyarakat memberdayakan rakyat*, (Bandung: Refika aditama, 2010) hlm 58

pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan c. berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.¹³

Sedangkan Chambers mengatakan bahwa Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*".¹⁴ Dengan masyarakat sebagai pusat pemberdayaan artinya masyarakat sebagai penganalisis masalah, perencana, pelaksana, dan pengevaluasian program.

Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi.¹⁵

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

¹³ Ibid, hlm 58

¹⁴ <http://www.ginandjar.com/public/09PemberdayaanMasyarakat.pdf>, 12 juli 2014

¹⁵ ibid

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang.

Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan

institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya.

Sungguh penting di sini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi. Friedman (1992) menyatakan “*The empowerment approach, which is fundamental to an alternative development, places the emphasis on autonomy in the decision-making of territorially organized communities, local self-reliance (but not autarchy), direct (participatory) democracy, and experiential social learning*”.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya

dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung.

Sedangkan dalam PNPM mandiri Pemberdayaan dalam konteks ini adalah membangun kembali potensi manusia itu sendiri yang sudah dimiliki untuk kembali mampu bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur tersebut yang kondusif terhadap tumbuhnya kapital social sehingga pada gilirannya akan mampu membangun kepedulian dan integritas yang tinggi yang melahirkan tata pengelolaan urusan publik yang baik serta solidaritas sosial masyarakat untuk bersatu, bahu-membahu menanggulangi kemiskinan di wilayah masing-masing secara mandiri dan berkelanjutan.

Secara singkat pembangunan dari dalam ini menekankan penggalian terhadap nilai-nilai luhur yang telah dimiliki manusia/masyarakat dan memberdayakan manusia/masyarakat untuk menjadi pelaku nilai sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsi masing-masing di masyarakat sesuai dengan martabatnya sebagai manusia yang luhur.¹⁶

PNPM lebih menekankan untuk membentuk manusia seperti mengubah mindset mereka. Proses pengembangan masyarakat ini adalah tumbuhnya kesadaran kritis dan kesiapan masyarakat bahwa persoalan kemiskinan di wilayahnya hanya dapat diatasi oleh mereka sendiri, dengan cara; (1) membangun kembali nilai-nilai luhur universal sebagai landasan dari semua keputusan dan tindakan, (2) menemukan dan menggalang pribadi-pribadi yang komit dan

¹⁶ Modul PNPM Mandiri Perkotaan

memiliki integritas tinggi dalam menanggulangi kemiskinan yg sehari-harinya merupakan pelaku nilai, (3) bertumpu pada keswadayaan masyarakat dan prinsip pembangunan organik yang berkelanjutan.

D. PNPM Mandiri

1. Pengertian dan Tujuan

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :

- a. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
- b. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM

Mandiri ini adalah :

- a. Tujuan Umum : Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.
- b. Tujuan Khusus
 - Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
 - Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
 - Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor)
 - Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

- Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
- Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
- Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

2. Komponen program

Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut :

a. Pengembangan Masyarakat.

Komponen Pengembangan Masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal

pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

b. Bantuan Langsung Masyarakat

Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.

c. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal

Komponen Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal adalah serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini diantaranya seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif dan sebagainya.

d. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi dan pengembangan program.

3. Pendekatan Program PNPM Mandiri

Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan :

- Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program.
- Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.
- Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.
- Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.
- Melalui proses pemberdayaan yang terdiri dari atas pembelajaran, kemandirian dan keberlanjutan.

4. Jenis Kegiatan yang Dilarang

Jenis kegiatan yang tidak boleh didanai melalui PNPM Mandiri adalah sebagai berikut :

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik.

- b. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah
- c. Pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obat terlarang dan lain-lain).
- d. Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan perlengkapannya.
- e. Pembiayaan gaji pegawai negeri.
- f. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah usia kerja.
- g. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan barang-barang yang mengandung tembakau.
- h. Kegiatan apapun yang dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dan instansi yang mengelola lokasi tersebut.
- i. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan dan penggunaan terumbu karang.
- j. Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dan atau menuju negara lain.
- k. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai.
- l. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luas lebih dari 50 Hektar (Ha).

- m. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha.
- n. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik.

E. Kesejahteraan

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Konsep kesejahteraan dapat dirumuskan memiliki empat indikator yaitu : rasa aman (*security*), Kesejahteraan (*welfare*), Kebebasan (*freedom*), dan jati diri (*Identity*)

Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah :¹⁷

- a. Tingkat pendapatan keluarga;

¹⁷ <http://perencanaankota.blogspot.com/2012/01/beberapa-konsep-tentang-kesejahteraan.html>, pada tanggal 17 maret pukul 09.30

- b. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan;
- c. Tingkat pendidikan keluarga;
- d. Tingkat kesehatan keluarga,
- e. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

F. Relevansi PNPM dengan Islam

Dalam relevansi PNPM dengan Islam bisa kita telaah dari logo PNPM. Logo PNPM Mandiri menggambarkan simbol bunga yang sedang mekar yang merepresentasikan tingkat kemajuan masyarakat. Bunga ini terdiri dari tiga buah kelopak yang diartikan sebagai tiga tahapan proses pemberdayaan yaitu tahap pembelajaran, kemandirian dan keberlanjutan.

Tahap pembelajaran pada PNPM ini sejalan dengan dengan islam yang disebutkan dalam hadis :

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَ مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَ مَنْ أَرَادَ هُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ
(رواه الطبراني)

Artinya :Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, mak ia harus memiliki ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat maka itupun harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka itupun harus dengan ilmu (HR. Thabrani).¹⁸

Untuk mendapatkan sesuatu manusia harus berusaha dengan belajar mendapatkan ilmu yang dibutuhkan. Dalam PNPM proses pembelajaran

¹⁸ Toni zakaria, <http://tonyzsma8smg.wordpress.com/2011/01/24/hadist-tentang-menuntut-ilmu/>, 19 Agustus 2014

masyarakat melalui penyadaran kritis agar bisa mengatasi permasalahan kemiskinan sampai kepada akarnya. PNPM Mandiri Perkotaan diharapkan dapat dijadikan sarana bagi proses pembelajaran masyarakat untuk terus melakukan perubahan-perubahan sendiri ke arah yang lebih baik dan efektif, baik itu menyangkut pola pikir, pola perilaku, pola tindak dan lain-lain. Inilah yang menjadi hakekat membangun masyarakat dari dalam.

Kedua yaitu tahap kemandirian dalam PNPM dijelaskan dari masyarakat berdaya menjadi masyarakat mandiri, yaitu dimana masyarakat bisamenolong dirinya secara mandiri, dengan tidak lagi bergantung kepada pihak lain termasuk kepada fasilitator (PNPM Mandiri Perktoaan). Ketika berhubungan dengan pihak lain, adalah untuk bekerjasama dalam kesetaraan. Artinya baik masyarakat maupun pihak lain saling membutuhkan, jadi ada kesalingbergantungan. Dalam islam juga dijelaskan untuk tidak bergantung pada orang lain, mulai dari tentang tangan diatas lebih baik dari tangan dibawah, dan hadis tentang

حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه حدثنا أبو هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم (أن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده
19(

Dari abu hurairah ra. Dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Nabi Daud AS tidak makan kecuali hasil dari usaha tanganya sendiri.(HR.bukhari)²⁰

Dan yang terakhir adalah keberlanjutan, Untuk menjamin keberlanjutan pengorganisasian masyarakat, dibutuhkan wadah (lembaga) yang dimotori oleh

¹⁹ Kitab *shahih bukhari, bihasiyat al imam al sindi*, darul kutub al 'amiyah. Jilid 2 Beirut. (Lebanon 2008. edisi ke 4. Kitabul buyu' hadis ke 2073

²⁰ Syarah riadus shalihin jilid 2, Rasyikh Lc, Luqman Abdul Jalal Lc, Marzuqi Lc, cetakan pertama desember 2007, Darussunah Press, Jatinegara, Jatim. Hal 783

pemimpin – pemimpin yang mempunyai nilai – nilai kebaikan (sikap mental yang positif). Sehingga PNPM sebenarnya hanya merupakan stimuli kemandirian masyarakat. Keberlanjutan ini semua tergantung pada semangat masyarakat untuk berubah menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan hadis yang artinya :
*“Barangsiapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin maka dia termasuk orang yang beruntung. Barangsiapa yang harinya sama dengan kemarin maka dia adalah orang yang merugi. Barangsiapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada harinya kemarin maka dia terlaknat.”*²¹

Jadi dalam Islam telah mengajarkan agar kita selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dalam proses pemberdayaan yaitu perubahan masyarakat untuk menjadi lebih baik. Dalam modul PNPM Mandiri Perkotaan dijelaskan Penyebab utama Kemiskinan adalah sikap mental para pelaku pembangunan yang negatif dan pandangan-pandangan yang merugikan kelompok masyarakat tertentu dimana kondisi ini menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat. Perlu perubahan dari kondisi yang ada sekarang ke arah yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan.

²¹ <http://www.risalahislam.com/2013/12/barangsiapa-yang-hari-ini-lebih-baik.html>, 20 Agustus 2014